

1. Minimnya personil petugas pembimbing kemasyarakatan, dengan jumlah terbatas dibandingkan dengan beban tugas dan wilayah kerja dirasakan sangat kurang sekali.
2. Hubungan tenaga pembimbing Bapas yang belum kuat dengan aparat penegak hukum lain, termasuk instansi pemerintah (Departemen Sosial).
3. Masalah klasik lain yang menimpa Bapas adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan secara maksimal diharapkan, para penegak hukum tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturan hukum. dan lebih ditingkatkan koordinasi dan kerja sama antar institusi penegak hukum.
2. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak di masa mendatang maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lapangan, di perlukan penambahan personil fungsional Bapas dan peningkatan dana operasional .

DAFTAR PUSTAKA

Syamsudin Muchtar, 2012. *Reformasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Makassar. Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasannudin

- Salam Moh Faisal. 2005, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : PT Mandar Maju
- Prakoso, Djoko 1988. Hukum Penintiesier di indonesia Yogyakarta : Liberty.
- Koesnoen, RA 1984, Susunan Pidana dalam Negeri Sosialis Indonesia. Bandung Sumur
- Waluyo, Bambang 1998. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prints Darwin 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Supramono, Gatot. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta : Jambatan
- Karim, Sumarsono A 2011, Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan , BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Arikonto, Suharsini. 1993. Prosedur penelitian Jakarta Bina Aksara.
- Dellyana, Santy. 1998. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta. Lberty.
- Gosita, Arif,2004. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : PT Ohvana Ilmu Populer.
- Hasan,Wadong Maulana, 2001. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Grasindo
- Sasangka Hari, 1996, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Pra penuntutan Surabaya Dharma Surya Berlian.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Bumi Aksara
- Surachman, Winarno, 1975, Dasar dan Teknik Research Bandung ; Tarsito
- 2002, Lembaga Pendidikan dan Latihan Mabes Polri, Buku Pedoman pelaksanaan Tugas Polri di lapangan. Jakarta
- Darwan Prinst, SH, 2003, Hukum Anak Indonesia, : PT Citra Aditya Bhakti Bandung
- Nashriana, SH, M.Hum, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia
- Moch Faisal Salam, SH., MH , 2005 , Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia : Mandar Maju

Redaksi Bumi Aksara, 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

2003, Peranan Bapas dalam Peradilan Anak Perlu di Tingkatkan. <http://www.hukumonline.com> (diakses 13 Oktober 2012)

2007, Hak Anak Belum Diperhatikan. Kompas Cyber Media (8 Maret 2004) .
<http://www.KCM.Com> (diakses 12 Oktober 2012)

Ikhsan F, 2002. Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak. USU Di gital Library.

Setiawan L. 2006. Konvensi Hak Anak dan Bangsa yang beradab , Kompas Cyber Media (24 Februari 2006) , <http://www.KCM.com>

Hukum Online. 2003. Peranan BAPAS dalam Peradilan Anak Perlu Ditingkatkan.(online)<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan> (diakses 13 Oktober 2012)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 penerbit Karya Anda Surabaya-Indonesia

